

# 2023 LAPORAN KINERJA

---

**Prepared by :**  
KPKNL Padangsidempuan

+62 811-6333-933 

@kpknlSidempuan 

kpknlSidempuan 



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2023.

Laporan kinerja KPKNL Padangsidempuan Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor



29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2023, KPKNL Padangsidempuan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Sidempuan Tahun 2023 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPKNL Padangsidempuan Tahun 2023 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan telah mencapai 115,04%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* 33,64%, *Customer Perspective* 20%, *Internal Process Perspective* 29,30%, dan *Learning & Growth Perspective* 28,10%.

Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Padangsidempuan kepada *stakeholder* yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara atau aset negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Akhir kata, LAKIN Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan kelengkapan bahan perumusan LAKIN Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan bagi pembaca terutama bagi DJKN.

Padangsidempuan, 06 Februari 2024

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik

Raden Hariyadi Murti Kurniawan

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| LEMBAR JUDUL.....                                 | i  |
| KATA PENGANTAR.....                               | ii |
| DAFTAR ISI.....                                   | iv |
| BAB I PENDAHULUAN.....                            | 1  |
| A.    LATAR BELAKANG.....                         | 1  |
| B.    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI..... | 2  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                   | 8  |
| A.    RENCANA STRATEGIS.....                      | 8  |
| B.    PERJANJIAN KINERJA.....                     | 9  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                | 12 |
| A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....             | 12 |
| B.    REALISASI ANGGARAN.....                     | 38 |
| PENUTUP.....                                      | 41 |
| LAMPIRAN  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki sebelas Unit Eselon 1 yang salah satunya merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJKN memiliki unit vertikal yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL sendiri mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Padangsidimpuan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPKNL Padangsidimpuan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* selama tahun 2023. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.
- k. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan KPKNL Padangsidimpuan dalam daerah/wilayah kerja wewenangannya berdasarkan peraturan. Wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan meliputi 14 wilayah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Kota Padangsidempuan;
- 2) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 4) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 5) Kabupaten Padang Lawas;
- 6) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 7) Kabupaten Mandailing Natal;
- 8) Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 9) Kabupaten Nias;
- 10) Kabupaten Nias Selatan;
- 11) Kabupaten Nias Utara;
- 12) Kabupaten Nias Barat;
- 13) Kota Gunungsitoli; dan
- 14) Kota Sibolga

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, maka susunan organisasi KPKNL Padangsidempuan menjadi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
- c. Seksi Piutang Negara, yang mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik,

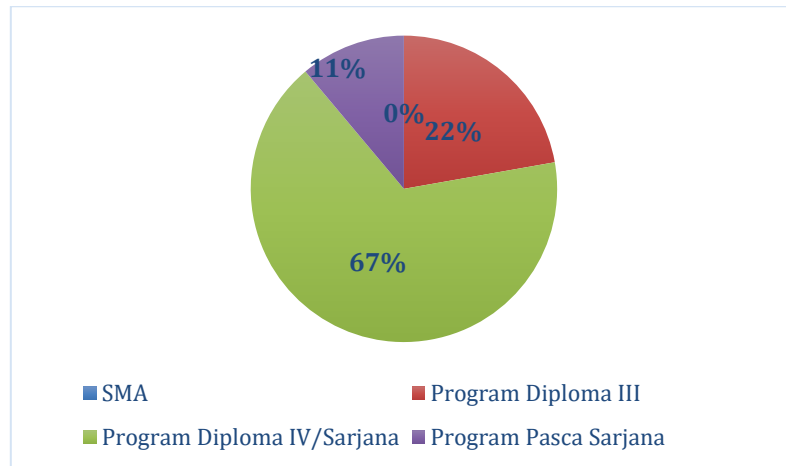
- laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- e. Seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
  - f. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang terdiri dari:
    - g. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - h. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



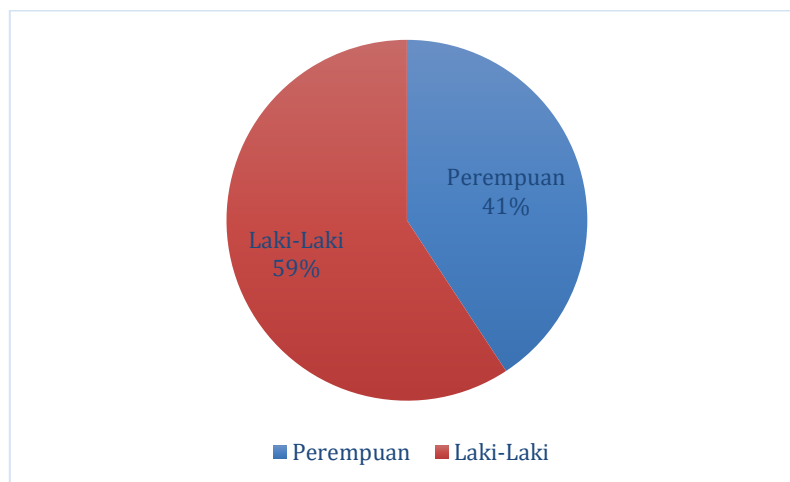
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Padangsidempuan didukung oleh 27 orang pegawai yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 4 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, 3 Pejabat Fungsional Pelelang, dan 14 Pelaksana.



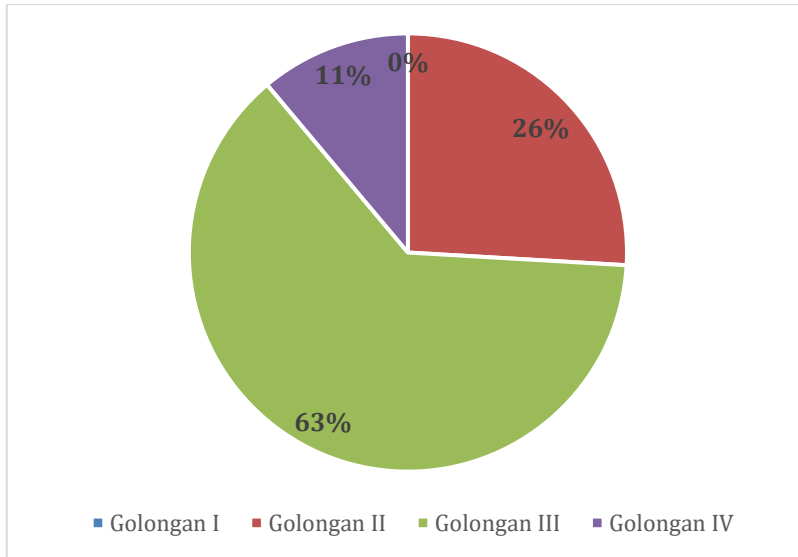
Grafik 1. 1 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Padangsidempuan mayoritas terdiri dari pegawai lulusan Program D-IV/Sarjana berjumlah 18 pegawai, lulusan Program D-III berjumlah 6 pegawai, dan lulusan Program Pascasarjana berjumlah 3 pegawai.



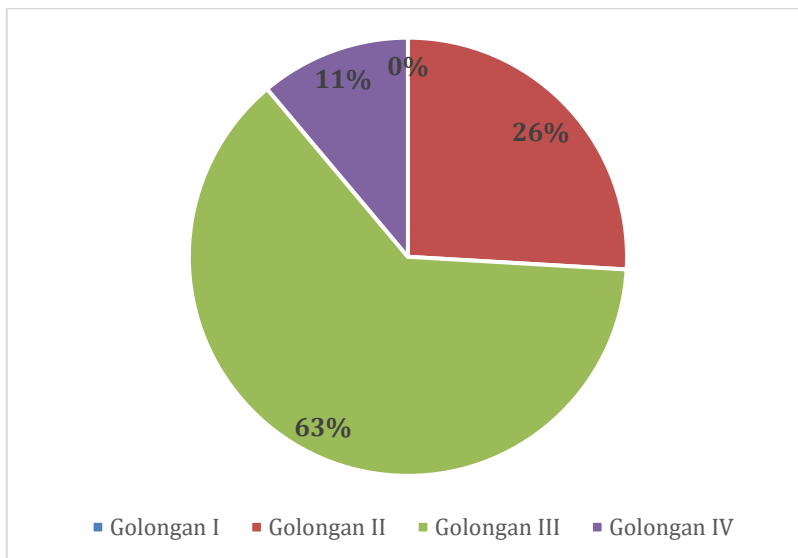
Grafik 1. 2 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Grafik 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin. Terlihat bahwa KPKNL Padangsidempuan terdiri dari 10 pegawai perempuan dan 17 pegawai laki-laki.



*Grafik 1. 3 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan*

Grafik 1.3 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis golongan. Terlihat bahwa KPKNL Padangsidempuan terdiri dari 3 pegawai golongan IV, 17 pegawai golongan III, dan 7 pegawai golongan II.



*Grafik 1. 4 Grafik Tenaga Fungsional*

Selanjutnya, pada Grafik 1.4 ditunjukkan sebaran jabatan fungsional pada KPKNL Padangsidempuan. terdapat 3 pegawai memiliki keahlian sebagai Pelelang, 4 pegawai memiliki keahlian Penilai Pemerintah, 2 Jurusita, dan 1 Pemeriksa.

### **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padangsidempuan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Padangsidempuan seperti tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPKNL Padangsidempuan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Padangsidempuan, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini, disajikan data pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Padangsidempuan, evaluasi dan analisis kinerja dan realisasi anggaran.
4. Bab IV Penutup Bab ini akan menguraikan tentang pencapaian, permasalahan dan kendala tahun 2023, dan strategi pemecahan masalah untuk tahun 2024.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah dan menunjukkan peran dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu: **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Padangsidempuan telah menetapkan misi yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPKNL Padangsidempuan Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan tata Kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat.

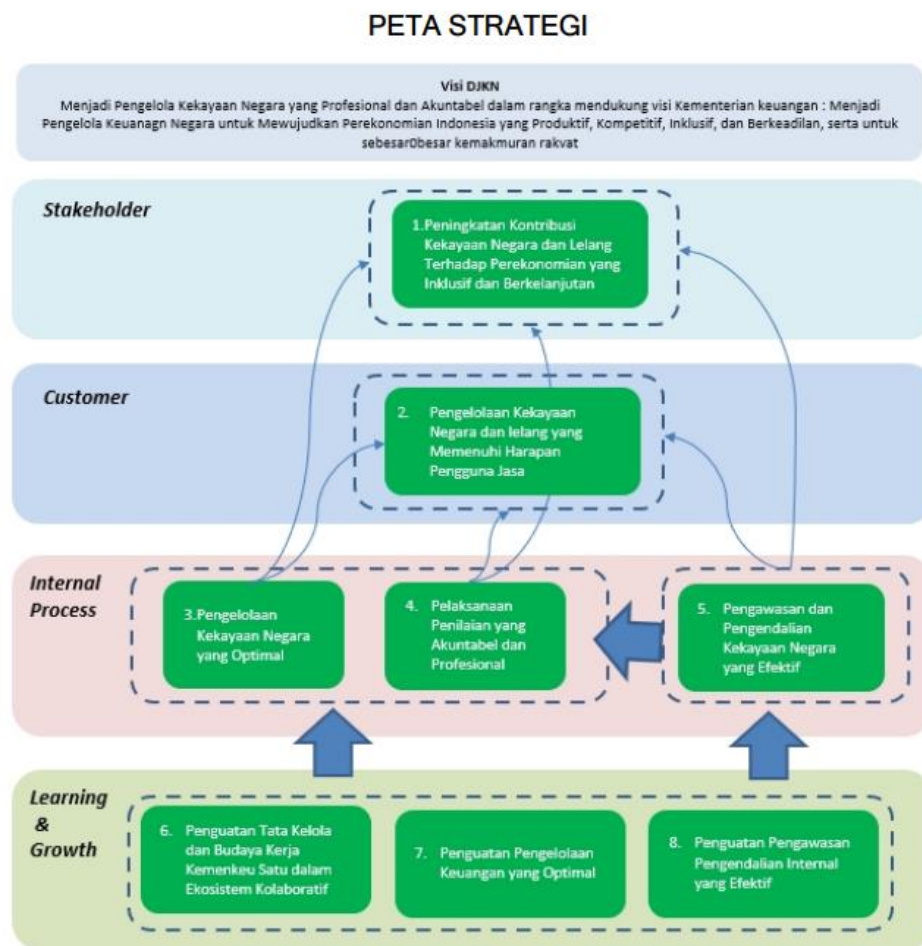
Kemudian, untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Padangsidempuan untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;

- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik Padangsidimpuan yang *agile*, efektif, dan efisien.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjadi tolak ukur kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan.



Gambar 2. 1 Peta Strategi Kemenkeu Three KPKNL Padangsidimpuan TA 2023

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Padangsidimpuan harus menjadi acuan sekaligus

landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) KPKNL Padangsidempuan.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi KPKNL Padangsidempuan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Dalam Peta Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan Tahun 2023 ditetapkan 8 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Padangsidempuan dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2023. Rincian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.

| Kode SS/IKU | SS dan IKU  | Target |     |        |     |        |      |      |
|-------------|---|--------|-----|--------|-----|--------|------|------|
|             |   | Q1     | Q2  | Smt. 1 | Q3  | s.d.Q3 | Q4   | Y    |
| 1           | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan |        |     |        |     |        |      |      |
| 1a-CP       | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                      | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 1b-CP       | Persentase produktivitas lelang   | 30%    | 45% | 45%    | 60% | 60%    | 80%  | 80%  |
| 2           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              |        |     |        |     |        |      |      |
| 2a-CP       | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 20%    | 40% | 40%    | 70% | 70%    | 100% | 100% |
| 2b-CP       | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara   | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 2c-CP       | Persentase Permohonan Lelang Online   | 20%    | 40% | 40%    | 63% | 63%    | 86%  | 86%  |
| 2d-CP       | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction                                      | 94%    | 94% | 94%    | 94% | 94%    | 94%  | 94%  |
| 3           | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal  |        |     |        |     |        |      |      |
| 3a-CP       | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK   | -      | 50  | 50     | 55  | 55     | 68   | 68   |
| 3b-CP       | Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan  | -      | 40% | 40%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 3c-cP       | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)  | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 4           | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  |        |     |        |     |        |      |      |
| 4a-CP       | Deviasi ketergunaan hasil penilaian   | 25%    | 25% | 25%    | 25% | 25%    | 25%  | 25%  |
| 5           | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif  |        |     |        |     |        |      |      |
| 5a-CP       | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara                                       | -      | 50  | 50     | -   | 50     | 86   | 86   |
| 5b-CP       | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN  | 15%    | 15% | 15%    | 15% | 15%    | 15%  | 15%  |

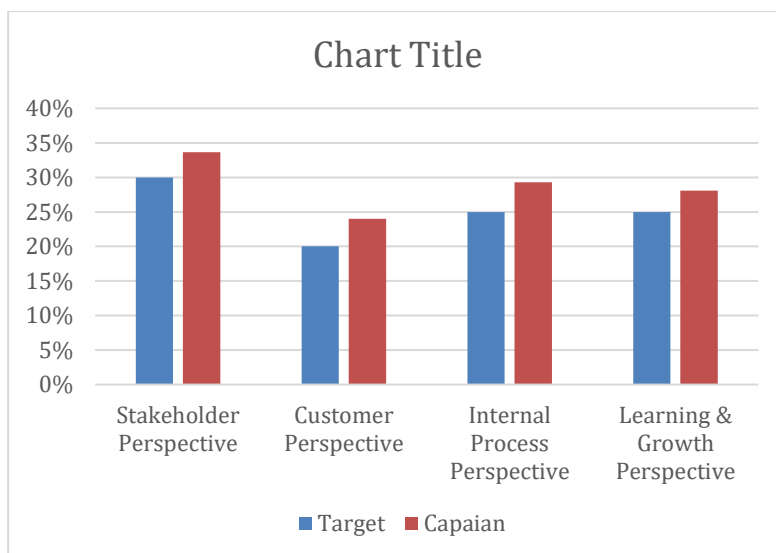
| Kode SS/IKU | SS dan IKU   | Target |      |        |      |        |       |       |
|-------------|--|--------|------|--------|------|--------|-------|-------|
|             |  | Q1     | Q2   | Smt. 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 6           | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif |        |      |        |      |        |       |       |
| 6a-N        | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko                         | -      | -    | -      | -    | -      | 80    | 80    |
| 6b-N        | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                       | 15%    | 40%  | 40%    | 75%  | 75%    | 100%  | 100%  |
| 7           | Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal                                      |        |      |        |      |        |       |       |
| 7a-CP       | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                     | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5  | 95,5  |
| 7b-N        | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                                | 10%    | 50%  | 50%    | 85%  | 85%    | 100%  | 100%  |
| 8           | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif                          |        |      |        |      |        |       |       |
| 8a-CP       | Indeks Integritas  | -      | -    | -      | -    | -      | 88,67 | 88,67 |
| 8b-CP       | Indeks Maturitas SPIP  | -      | -    | -      | -    | -      | 100   | 100   |
| 8c-N        | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif                                  | -      | -    | -      | -    | -      | 60    | 60    |
| 8d-N        | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM                              | -      | -    | -      | -    | -      | 100   | 100   |

Tabel 2. 1 Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Padangsidempuan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan adalah sebesar 115,04%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Grafik Capaian Kinerja Berdasarkan Perspektif

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa KPKNL Padangsidempuan telah mencapai target kinerja.

Berdasarkan tahun 2023, terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan yang terdiri dari 18 IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU dan 2 IKU dengan status capaian KUNING yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM. Berikut rincian capaian kinerja atas 20 IKU KPKNL Padangsidempuan Tahun 2023:

| No. | Kode IKU | Uraian IKU   | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Index Max. 120% |
|-----|----------|--|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1   | 1a-CP    | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 165,72%        | 100%        | 135,65%        | 120%            |
| 2   | 1b-CP    | Persentase produktivitas lelang  | 132,59%        | 80%         | 105,00%        | 120%            |
| 3   | 1c-CP    | Indeks Integritas  | -              | 88,67       | 89,17          | 100,56%         |
| 4   | 2a-CP    | Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 191,89%        | 100%        | 165,77%        | 120%            |
| 5   | 2b-CP    | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                          | 1205,09%       | 100%        | 123,92%        | 120%            |
| 6   | 3a-CP    | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK                            | 124,73%        | 68%         | 82,12%         | 120%            |
| 7   | 3b-CP    | Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan                         | 114,51%        | 100%        | 181,87%        | 120%            |
| 8   | 3c-cP    | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN                                 | 126,67%        | 100%        | 120,59%        | 120%            |
| 9   | 4a-CP    | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                        | 135,45%        | 100%        | 141,80%        | 120%            |
| 10  | 4b-CP    | Persentase Permohonan Lelang Online                                      | -              | 86%         | 100%           | 116,28%         |
| 11  | 4c-CP    | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction       | 108,70%        | 94%         | 100%           | 106,38%         |

|                                       |       |   |         |      |        |                |
|---------------------------------------|-------|---|---------|------|--------|----------------|
| 12                                    | 5a-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian                               | 2,12%   | 25%  | 0%     | 120%           |
| 13                                    | 6a-CP | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | 110,14% | 86%  | 98,48% | 114,52%        |
| 14                                    | 7a-N  | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko          | -       | 80   | 98,45  | 120%           |
| 15                                    | 7b-N  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                        | 120%    | 100% | 120%   | 120%           |
| 16                                    | 8a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                      | 99,2%   | 100% | 96,46% | 96,46%         |
| 17                                    | 8c-N  | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                 | 203%    | 100% | 120%   | 120%           |
| 18                                    | 8d-CP | Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN                                 | 0%      | 15%  | 0%     | 120%           |
| 19                                    | 9a-N  | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif                   | -       | 60   | 98,14  | 120%           |
| 20                                    | 9b-N  | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM               | -       | 100  | 90     | 90%            |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b> |       |   |         |      |        | <b>115,04%</b> |

Tabel 3. 1 Rincian Capaian Kinerja

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan tahun 2023 tersebut, KPKNL Padangsidempuan melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan tahun 2023. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja Tahun 2023. Berikut ini

disajikan analisis dan evaluasi atas analisis dan evaluasi target setiap IKU dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidimpuan tahun 2023.

## **1. SASARAN STRATEGIS: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

### **a. Indikator Kinerja Utama: Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

- 1) PNBP Pengelolaan BMN yaitu penerimaan dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diproses atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau dari perolehan lain yang sah yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L yang bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan. Besar penerimaan negara dari pengelolaan BMN ditargetkan sebesar Rp3.775.000.000 yang capaiannya sebesar Rp5.084.826.802 atau 134,70% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Persentase capaian kinerja dari PNBP Pengelolaan BMN ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2022.
- 2) PNBP Piutang Negara adalah penerimaan negara sebagai akibat dari perjanjian atau lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Total realisasi PNBP Piutang Negara yang dicapai tahun 2023 adalah sebesar Rp39.836.508 atau 1593,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000. Dalam merealisasikan IKU ini, seksi Piutang Negara telah melakukan berbagai upaya seperti penagihan secara *on the spot*, komunikasi via telepon serta Kebijakan *Crash Program*/Keringanan Utang melalui PMK 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

- 3) PNBP Lelang, terdiri dari:
  - a) Bea lelang pejabat lelang kelas I;
  - b) Bea lelang pegadaian;

- c) Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Bea Lelang;
- d) Biaya permohonan lelang;
- e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Total realisasi PNBPN Lelang yang dicapai tahun 2023 adalah sebesar Rp2.237.682.901 atau 135,62% dari target awal tahun sebesar Rp1.650.000.000.

Persentase capaian kinerja dari PNBPN Lelang memperoleh status capaian HIJAU, hal ini dapat tercapai atas kerja keras Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang yang rutin melaksanakan penggalan potensi lelang ke pemerintahan daerah maupun perbankan, sosialisasi mengenai lelang.go.id, serta penggalan potensi lelang UMKM sehingga daya beli dan minat masyarakat terhadap barang lelang menjadi meningkat.

| Kode Iku | Uraian Iku   | Uraian               | Target 2023     | Realisasi 2023   | Indeks Max. 120% |
|----------|--|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1a-CP    | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | PNBP Pengelolaan BMN | Rp3.775.000.000 | Rp 5.084.826.802 | 120%             |
|          |  | PNBP Piutang Negara  | Rp2.500.000     | Rp 39.836.508    |                  |
|          |  | PNBP Lelang          | Rp1.650.000.000 | Rp 2.237.682.901 |                  |

*Tabel 3. 2 Capaian Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

- Dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. melakukan penggalan potensi PNBPN Aset kepada satuan kerja secara langsung maupun melalui surat,
  2. melakukan permintaan data Potensi PNBPN terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan dari satuan kerja

### 3. meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri terkait penjualan Barang Rampasan

Keberhasilan atas pencapaian peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja untuk tertib dalam hal pemanfaatan maupun penjualan BMN dengan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan satuan kerja. Penggunaan atas efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan upaya untuk peningkatan pencapaian target kinerja. Dalam mencapai target yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara memberikan surat kepada satuan kerja untuk melakukan pemetaan proyeksi pemanfaatan dan potensi BMN rusak berat yang akan diajukan permohonan penjualannya serta dengan melakukan monitoring terhadap pendataan tersebut secara online.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) serta koordinasi secara berkesinambungan dan bekerja sama dengan satuan kerja yang memiliki potensi PNBP.

Untuk dapat mencapai target di tahun selanjutnya terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dalam hal penggalan potensi PNBP baik secara langsung maupun melalui penyampaian surat.

#### **b. Indikator Kinerja Utama: Persentase produktivitas lelang**

Produktivitas lelang dinilai dari sebesar intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai satu frekuensi lelang laku.

Target persentase produktivitas lelang ditetapkan pada awal tahun 2023 sebesar 80% dan mencapai realisasi sebesar 110.44% atau persentasenya mencapai 120% indeks maksimal dengan status capaian HIJAU.

| Kode Iku | Uraian Iku       | Target 2023 | Realisasi 2023 |          | Indeks Max. 120% |
|----------|------------------|-------------|----------------|----------|------------------|
| 1b-CP    | Frekuensi Lelang | 80%         | 454            | 114,07 % | 120%             |

|  |                                 |             |  |     |  |  |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----|--|--|
|  | Persentase produktivitas lelang | Lelang Laku |  | 398 |  |  |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----|--|--|

Tabel 3. 3 Capaian Persentase Produktivitas Lelang

### c. Indikator Kinerja Utama: Indeks Integritas

Indeks integritas mengukur tingkat integritas melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal Lembaga, dan para pihak pemangku kepentingan. Tujuan dari penilaian integritas diharapkan dapat bermanfaat untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan rencana aksi. Indeks Integritas memiliki target sebesar 88,67 dengan realisasi 89,17 sehingga capaiannya sebesar 100,56%.

| Kode Iku | Uraian Iku        | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Max. 120% |
|----------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 1c-CP    | Indeks Integritas | -              | 88,67       | 89,17          | 100,56%          |

Tabel 3. 4 Capaian Indeks Integritas

## 2. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif.

| Kode Iku | Uraian Iku                         | Target 2023      | Realisasi 2023   | Indeks Max. 120% |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2a-CP    | Persentase Realisasi Pokok Kelas I | Rp23.550.000.000 | Rp28.415.821.903 | 120%             |

|  |              |                 |                  |                   |  |
|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
|  | Pokok Lelang | Pokok Pegadaian | Rp36.450.000.000 | Rp104.196.744.000 |  |
|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------|--|

Tabel 3. 5 Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang

### b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari:

- 1) Penagihan piutang negara berupa angsuran atau pelunasan piutang
- 2) Optimalisasi pengurusan piutang negara, misalnya a) penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), b) pengembalian Berkas Kepengurusan Piutang Negara (BKPN), c) pengurusan piutang negara telah selesai (SPPNS).

Realisasi Tingkat penurunan outstanding piutang negara telah mencapai target. Pencapaian IKU ini dilakukan dengan penagihan langsung kepada penanggung utang untuk melakukan pembayaran dan melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap penanggung utang untuk mengetahui domisili dan kemampuan, serta melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dan pejabat pemerintah setempat sehingga keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang dapat diketahui. KPKNL Padangsidempuan juga terus aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyerah piutang. Keaktifan dalam pengurusan BKPN dengan memanfaatkan seluruh potensi BKPN yang ada walaupun dalam kondisi BKPN yang 'terbatas' (debitur yang tidak ditemukan, BKPN yang hampir seluruhnya tanpa disertai barang jaminan).

| Kode Iku | Uraian Iku                                      | Realisasi 2022   | Target 2023   | Realisasi 2023  | Indeks Max. 120% |
|----------|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2b-CP    | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | Rp602.543.818,07 | Rp292.320.000 | Rp2.602.388.297 | 120%             |

*Tabel 3. 6 Capaian Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara*

Untuk mencapai target tersebut, KPKNL Padangsidempuan melakukan mitigasi risiko dengan selalu didampingi oleh penyerah piutang dan instansi setempat pada setiap kegiatan pengurusan piutang yang dilaksanakan di lapangan, serta mengikutsertakan mereka dalam proses administrasi dalam pelaksanaan tugas pengurusan piutang.

Terdapat beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target di tahun berikutnya yaitu dengan tetap menjalin kerja sama yang baik dengan penyerah piutang dan melakukan penelitian lapangan dan pemeriksaan terhadap para penanggung utang dengan nilai sisa utang di atas Rp500.000.000,-.

### **3. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

#### **a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan**

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

- 1) Kendali BPN:
  - a) Melaksanakan pensertipikatan BMN;
  - b) Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan
- 2) Kendali K/L
  - a) Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya
  - b) Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
  - c) Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
  - d) Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan;
  - e) Mengajukan permohonan sertifikasi;
  - f) Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
  - g) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.
- 3) Kendali Kemenkeu:
  - a) Menyimpan asli sertipikat;

- b) Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
- c) Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
- d) Pengalokasian anggaran sertifikasi
- e) Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:
- f) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- g) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- h) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- i) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- j) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

| Kode Iku | Uraian Iku                                       | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Max. 120% |
|----------|--|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 3a-CP    | Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan | 702            | 353         | 642            | 120%             |

Tabel 3. 7 Capaian Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Realisasi IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan KPKNL Padangsidimpuan tahun 2023 mencapai 181,87% (terrealisasi 642 bidang dari target 353 bidang tanah BMN) dengan status capaian HIJAU. IKU ini jika dibandingkan pencapaiannya dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 67,36% (capaian tahun 2022 sebesar 114,51%). Dalam upaya pencapaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi rutin dengan satuan kerja target dan Kantor Pertanahan terkait
- 2) Monitoring dan evaluasi progres sertipikasi secara rutin
- 3) Mendorong Satuan Kerja untuk meningkatkan status progress pensertipikatan melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Kanwil maupun unit eselon

Peningkatan capaian Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan pada tahun 2023 dikarenakan koordinasi intensif dan kerja sama yang terbangun dengan seluruh mitra sertipikasi, juga sangat didukung oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja untuk tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengamanan tanah BMN.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara KPKNL Padangsidempuan, satuan kerja target, dan Kantor Pertanahan. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan utamanya didukung oleh koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait, pengelolaan tanah BMN yang lebih tertata, peningkatan keterlibatan dan *concern level* pimpinan K/L, serta didukung juga dengan penggunaan SIMAN sebagai alat bantu pengelolaan BMN.

Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU ini adalah pegawai Kepala dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (jumlah 5 orang). Penggunaan sumber daya keuangan (finansial) dilakukan dengan efisien, terbukti dengan penggunaan 90% dari anggaran yang tersedia telah menghasilkan capaian kinerja di atas target (181,87%).

Rencana aksi terkait IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan telah dilakukan sesuai target waktu dan sesuai rencana kegiatan yang diagendakan. Risiko senantiasa dimitigasi dan dinilai ulang menyesuaikan setiap kejadian yang berpotensi menghambat pencapaian IKU.

Rencana aksi yang diagendakan antara lain pelaksanaan kerja sama (penandatanganan MoU) antara KPKNL dengan Kantor Pertanahan terkait target sertipikasi 2024, koordinasi berkelanjutan dengan satuan kerja target, monitoring dan evaluasi rutin atas capaian dan kendala yang dihadapi.

#### b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU persentase efektivitas penyelesaian BPKN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

| Kode Iku | Uraian Iku                               | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Max. 120% |
|----------|--|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 3b-CP    | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN | 19 berkas      | 34 berkas   | 41 berkas      | 120%             |

Tabel 3. 8 Capaian Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Pada tahun 2023, sebanyak 34 berkas BKPN ditargetkan untuk dapat diselesaikan dan pada akhir 2023 sebanyak 41 berkas BKPN dapat terealisasi. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2023 dapat dicapai dengan melakukan:

- 1) penagihan langsung kepada penanggung utang untuk melakukan pembayaran,
- 2) penelitian/pemeriksaan terhadap penanggung utang untuk mengetahui domisili dan kemampuan/usaha sehingga BKPN dapat diselesaikan melalui penugasan atau penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 3) Koordinasi dengan penyerah piutang dan pejabat pemerintah setempat sehingga dapat diberikan keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang

#### 4. SASARAN STRATEGIS: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

##### a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) mencapai realisasi sebesar 141,80% dari 100% yang ditargetkan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian HIJAU. Peningkatan

persentase capaian terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah realisasi pengukuran dalam implementasi evaluasi kinerja BMN.

| Kode IKU | Uraian IKU  | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 4a-CP    | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 135,45%           | 100%           | 141,80%           | 120%                   |

Tabel 3. 9 Capaian Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

**b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online**

Persentase pelaksanaan permohonan lelang online mencapai realisasi sebesar 100% dari 86% yang ditargetkan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 116,28% dengan status capaian HIJAU.

| Kode IKU | Uraian IKU                                      | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 4b-CP    | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online | -                 | 86%            | 100%              | 116,28%                |

Tabel 3. 10 Capaian Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

**c. Indikator Kinerja Utama: Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction**

E-Auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-Auction ini terdiri

dari 2 jenis, yaitu Aplikasi Lelang melalui Email (ALE) dan Aplikasi Lelang melalui Internet (ALI) sehingga lebih real time dan terbuka.

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang optimal dan transparan. Hal ini karena e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

| Kode IKU | Uraian IKU   | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 4c-CP    | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction | 100%              | 94%            | 100%              | 106,38%                |

*Tabel 3. 11 Capaian Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction*

Persentase pelaksanaan lelang E-auction dan E-conventional tahun 2023 ditargetkan sebesar 94% dan mencapai realisasi 100% atau sebesar 106,38% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Realisasi capaian ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 yaitu sama-sama mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan.

## **5. SASARAN STRATEGIS: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

### **a. Indikator Kinerja Utama: Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

| Kode IKU | Uraian IKU                                | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 5a-CP    | Deviasi<br>Ketergunaan<br>Hasil Penilaian | 2,12%             | 25%            | 0,00%             | 120%                   |

Tabel 3. 12 Capaian Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah sebesar 0,00% dari target sebesar 25% dengan persentase sebesar 120% dengan status capaian kinerja HIJAU. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah melakukan Upaya extra effort untuk mencapai target kinerja ini dengan cara:

- 1) Memaksimalkan verifikasi dokumen permohonan penilaian, survei lapangan, agar data dan/atau informasi yang *up to date*, terpercaya, dan akuntabel diperoleh oleh Tim Penilai.
- 2) Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian melalui pelaksanaan kegiatan monitoring konsep laporan/pemaparan konsep laporan, dan evaluasi hasil kaji ulang laporan penilaian oleh Kantor Wilayah.

- 3) Melakukan koordinasi atau memberikan penjelasan kepada Pengelola terkait objek penilaian dan proses penentuan Nilai Wajar/ekspos hasil penilaian sehingga Pengelola dapat lebih meyakini Nilai Wajar hasil penilaian daripada Nilai Wajar yang diajukan oleh Satuan Kerja.

Terdapat kendala dalam pencapaian target ini karena satuan kerja mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan atau pemanfaatan memberikan/mengajukan nilai taksiran yang terlalu tinggi atau lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihasilkan oleh penilai pemerintah, indikasi penyebabnya yaitu karena nilai taksiran bukan melalui proses keilmuan penilaian. Untuk dapat meminimalisir kendala ini di tahun berikutnya, Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah perlu melakukan koordinasi atau memberikan penjelasan kepada pengelola terkait objek penilaian dan proses penentuan nilai wajar/ekspos hasil penilaian sehingga pengelola dapat lebih meyakini nilai wajar hasil penilaian daripada nilai wajar yang diajukan oleh satuan kerja.

Dalam mencapai target dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya:

- 1) KPKNL Padangsidempuan mengutamakan efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan tugas penilaian dengan melaksanakan penilaian secara perorangan, atau secara tim (tiga orang) namun pelaksanaan survei oleh dua orang anggota tim.
- 2) Pagu anggaran kegiatan survei dalam rangka penilaian tahun 2023 sebesar Rp35.640.000,00 (cakupan wilayah kerja pelayanan sebanyak empat belas kota/kabupaten termasuk lima kota/kabupaten di Pulau Nias) dengan jumlah pelaksanaan survei sebanyak lima puluh empat frekuensi dan seratus dua puluh delapan laporan penilaian.

Untuk mencapai target ke depannya, perlu dilakukan rencana aksi, yaitu:

- 1) Melakukan edukasi kepada satuan kerja/pengguna maupun pengelola tentang teknis pelaksanaan atau penentuan Nilai Taksiran agar mendekati kewajaran nilai melalui kegiatan *sharing knowledge*, edukasi dan komunikasi (edukom), penjelasan/ekspos hasil penilaian kepada pengelola.

- 2) Melaksanakan SOP Penilaian mulai dari verifikasi dokumen permohonan penilaian, pelaksanaan survei, pengumpulan data dan/atau informasi, analisis, monitoring konsep laporan/pemaparan konsep laporan secara akuntabel.

**6. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

**a. Indikator Kinerja Utama: Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada KPKNL Padangsidimpuan tahun 2023 mencapai 98,48% dari target yang ditetapkan 86% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 114,51% dengan status capaian HIJAU. IKU ini jika dibandingkan pencapaiannya dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,37%. Dalam upaya pelaksanaan IKU tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: melakukan monitoring persetujuan pemanfaatan penjualan pada semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023. Terdapat 1 (Satu) persetujuan yang tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja dikarenakan perubahan kebijakan internal pada satuan kerja tersebut. Untuk persetujuan yang memiliki potensi untuk tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi langsung terkait masalah dan penyebabnya, serta tetap mengarahkan untuk tetap mengupayakan tindak lanjut persetujuan demi mewujudkan penertiban aset.

| Kode IKU | Uraian IKU  | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Max. 120% |
|----------|---|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 6a-CP    | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | 2,12%          | 86%         | 98,48%         | 114,52%          |

Tabel 3. 13 Capaian Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan IKU ini adalah dengan melakukan monitoring dan asistensi, baik dalam hal kegiatan pemanfaatan maupun penjualan, mulai dari proses penjualan awal hingga proses akhir tindak lanjut.

Untuk memitigasi risiko atas pelaksanaan beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan menganalisis sejak awal detail pengajuan permohonan pemanfaatan dan penjualan, baik terkait detail BMN maupun potensi terlaksananya hingga ditindaklanjuti. Hal ini juga dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi langsung dalam hal pengawasan dan pengendalian proses pengelolaan BMN.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan adalah terus meningkatkan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian terhadap satuan kerja dalam hal pengajuan permohonan hingga pelaksanaan tindak lanjut.

## **7. SASARAN STRATEGIS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**

### **a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Pengelolaan Kinerja Dan Kualitas Manajemen Risiko**

IKU ini memiliki 2 (dua) komponen penilaian utama, yaitu review berkelanjutan atas kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, serta review atas kualitas implementasi manajemen risiko. Penilaian atas kedua komponen ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memuat pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja, baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Reviu atas kualitas pengelolaan kinerja bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja diimplementasikan dengan efektif. Proses reviu dilakukan melalui *self assessment* (penilaian mandiri), adapun penetapan hasil penilaian tingkat unit eselon III (KPKNL) dilakukan penilaian oleh Manajer Kinerja tingkat Eselon II (Kanwil DJKN).

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko

serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Indeks Kualitas Manajemen Risiko dilihat dari tiga aspek, yaitu kelengkapan piagam dan formulir risiko, kesesuaian isi formulir, kepatuhan penyampaian, kesesuaian format dan dokumen pendukung. Penilaian kualitas manajemen risiko dilakukan secara self assesment untuk selanjutnya direviu secara berjenjang. Indeks Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL direviu oleh kantor wilayah.

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja terealisasi 99,08 dan Indeks Kualitas Manajemen Risiko terealisasi 98,45. Dengan demikian, capaian gabungan atas IKU ini adalah sebesar 98,45 (target 80,00) dan persentase realisasi dibandingkan target sebesar 123,06%.

| Kode IKU | Uraian IKU  | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 7a-N     | Indeks<br>Pengelolaan<br>Kinerja Dan<br>Kualitas<br>Manajemen<br>Risiko | -                 | 80             | 98,45             | 120%                   |

Tabel 3. 14 Capaian Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Dalam mencapai target, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian target IKU, yaitu:

- 1) Pelaksanaan *one on one meeting* terkait kinerja antara Seksi Kepatuhan Internal dengan masing-masing seksi/subbagian/kelompok jabatan fungsional. Agenda ini bertujuan untuk menginternalisasi aturan dan pedoman terkait pengelolaan kinerja bagi seluruh pegawai dan juga memastikan setiap pegawai dapat menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berkualitas secara mandiri.

- 2) Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) periodik yang melibatkan seluruh pegawai dan berfokus pada diskusi pencarian solusi atas kendala yang dihadapi dan upaya perbaikan pencapaian target.
- 3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pengelolaan kinerja dan risiko secara rutin kepada pegawai, baik secara informal melalui tayangan pada ruang pelayanan (APT), *Whatsapp group* pegawai KPKNL Padangsidempuan, maupun formal melalui forum Kamis Informatif, penyampaian nota dinas, dan sosialisasi.

Keberhasilan dari pencapaian IKU ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan aturan dan tepat waktu, serta memastikan setiap tahapan kinerja telah didokumentasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara Seksi Kepatuhan Internal selaku pengelola kinerja organisasi, Subbagian Umum selaku pengelola kinerja pegawai, dan seluruh pegawai KPKNL Padangsidempuan. Pencapaian IKU ini menggunakan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU ini adalah pegawai Kepala dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal (jumlah 3 orang) yang telah mengikuti pelatihan terkait kinerja dan risiko. Tidak terdapat sumber daya keuangan (finansial) yang secara khusus terpakai untuk pencapaian target IKU ini yang menandakan bahwa penggunaan sumber daya telah dipergunakan dengan efisien.

Nilai reviu pengelolaan kinerja utamanya didukung oleh perbaikan terus menerus dalam pengelolaan kinerja dengan pelaksanaan *refinement* IKU dan *resources forum* anggaran yang lebih tertata, peningkatan keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan IKU dan manual IKU, serta didukung juga dengan penggunaan e-performance dalam manajemen kinerja.

Rencana aksi terkait pengelolaan kinerja dan implementasi manajemen risiko telah dilakukan sesuai target waktu dan sesuai rencana kegiatan yang diagendakan. Risiko senantiasa dimitigasi dan dinilai ulang menyesuaikan setiap kejadian yang berpotensi menghambat pencapaian IKU.

## b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

| Kode IKU | Uraian IKU                                 | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 7b-N     | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 120%              | 100%           | 120%              | 120%                   |

Tabel 3. 15 Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2023 mencapai 120% dari target sebesar 100% atau status capaian kinerja HIJAU.

## 8. SASARAN STRATEGIS: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

### a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

mencapai 94,53% dan nilai SMART DJA 90,99% dimana untuk pembobotan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) terdiri dari komposisi 50% nilai IKPA dan 50% nilai SMART sehingga secara akumulasi realisasi IKU untuk Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) tercapai 92,76% atau secara persentase mencapai 96,47% dari target dengan status capaian KUNING.

| Kode IKU | Uraian IKU  | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 8a-CP    | Indeks Kinerja<br>Kualitas<br>Pelaksanaan<br>Anggaran | 94,75%            | 100%           | 96,46%            | 96,46%                 |

*Tabel 3. 16 Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran*

Adapun isu utama terkait kendala dalam pencapaian IKU ini dikarenakan terdapat penyerapan yang tidak sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan capaian nilai penyerapan anggaran yang tidak optimal pada aplikasi SMART. Adanya belanja modal pekerjaan pembangunan rumah negara pada tahun 2023 yang terealisasi pada triwulan IV tahun 2023 sehingga mempengaruhi nilai penyerapan pada IKU IKKPA. Dalam upaya peningkatan target kinerja IKU IKKPA kedepannya maka penyerapan anggaran agar sesuai dengan trajectory penyerapan sesuai dengan PMK.

Untuk mencapai target IKU IKKPA yang optimal maka harus memperbaiki perencanaan penggunaan anggaran, menerapkan prinsip value for money/ menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien, melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi/bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulannya.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan capaian IKU IKKPA adalah dengan melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing seksi/bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.

**a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Kualitas Pengelolaan BMN Dan Pengadaan**

Pada persentase kualitas pengadaan mencapai 228%, realisasi ini dihitung dari pemanfaatan aplikasi SIRUP-E, E-Tendering/Seleksi, Non e-Tendering & Non e-Purchasing serta E-Kontrak yang disesuaikan dengan paket belanja yang diumumkan pada aplikasi RUP dimana realisasi persentase kualitas pengadaan tercapai 228% atau secara persentase mencapai 120% dari target dengan status capaian HIJAU.

| Kode IKU | Uraian IKU   | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 8c-N     | Persentase<br>Kualitas<br>Pengelolaan BMN<br>Dan Pengadaan | 203%              | 100%           | 120%              | 120%                   |

*Tabel 3. 17 Capaian Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan*

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan sudah berjalannya penggunaan aplikasi SIMAN v2 yang memudahkan pengguna dalam pengelolaan BMN dan penginputan pada aplikasi SIMPEL dalam belanja yang sudah sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan BMN yang sudah 100% menggunakan aplikasi SIMAN v2 baik dalam pengelolaan Penetapan Status Penggunaan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Inventarisasi BMN. dan seluruh pengadaan sudah diinput lewat aplikasi simpel. Penggunaan sumber daya yang baik menjadi salah satu faktor dalam mencapai target dalam hal ini persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan sebesar 228%.

Semakin ditingkatkannya implementasi SIMAN v2, LPSE Kemenkeu, SIMPEL, dan aplikasi lainnya serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Untuk dapat mencapai target di tahun berikutnya perlu dilakukan rencana aksi berupa pembuatan rencana kerja dan melaksanakan pengelolaan BMN dan pengadaan yang baik serta melaporkan segala kegiatan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**a. Indikator Kinerja Utama: Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

PNBP Fungsional DJKN merupakan jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425781, 425784 (Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian).

Target deviasi PNBP dari PNBP Lelang dan PNBP dari Biad PPN maksimal 10% dan capaian deviasi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,00% yang artinya tidak ada selisih antara aplikasi OM SPAN dengan Dropbox dan Focus PN pada tahun 2023.

| Kode IKU | Uraian IKU                              | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 8d-CP    | Deviasi Data<br>PNBP Fungsional<br>DJKN | 0,00%             | 15%            | 0,00%             | 120%                   |

Tabel 3. 18 Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

**9. SASARAN STRATEGIS: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif**

**a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan penilaian efektivitas Pengawasan dan Pengendalian UKI memiliki 12 (dua belas) unsur penilaian, yakni:

- 1) Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
- 2) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),

- 3) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
- 4) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
- 5) Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
- 6) Penyusunan Profil Pegawai,
- 7) Penyusunan Simpulan dan LPPI,
- 8) Jumlah Pengaduan Masyarakat,
- 9) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
- 10) Kepuasan Stakeholders, dan
- 11) Hasil Survei Penilaian Integritas.

Pada tahun 2023, Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif memiliki target sebesar 60 dengan realisasi sebesar 98,14 dan capaian 120%

| Kode IKU | Uraian IKU                                      | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 9a-N     | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif | -                 | 60             | 98,14             | 120%                   |

*Tabel 3. 19 Capaian Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif*

Target ini dapat dicapai karena Seksi Kepatuhan dan Internal KPKNL Padangsidimpuan melakukan beberapa Upaya, di antaranya:

- 1) SDM UKI memenuhi kompetensi yang diperlukan, memiliki akses data dan informasi melalui kepemilikan role UKI, memanfaatkan akses aplikasi dalam pemantauan proses bisnis
- 2) Melakukan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
- 3) Melakukan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) dan Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
- 4) Melakukan Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), Penyusunan Profil Pegawai, dan Penyusunan Simpulan dan LPPI,
- 5) UKI telah menangani Pengaduan kurang dari 30 hari kalender

- 6) Dari survei kepuasan stakeholder uki diperoleh bahwa stakeholder sangat puas. Adapun nilai yang diberikan : 96, 14 ( Rentang Nilai Sangat Puas : 81-100)
- 7) Tidak ada pegawai KPKNL Padangsidimpuan
- 8) Hasil Survei Penilaian Integritas DJKN memiliki target sebesar 88,67 , dengan realisasi 89,17

Dalam mencapai target tersebut, KPKNL Padangsidimpuan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Nama Kegiatan                                    | Anggaran    |             |                      |           |
|-----|--|-------------|-------------|----------------------|-----------|
|     |  | Pagu        | Realisasi   | Persentase Realisasi | Efisiensi |
| 1.  | Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal | 9.420.000,- | 7.127.328,- | 84,07%               | 15,93%    |

Tabel 3. 20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi yang dapat dilaksanakan untuk dapat mencapai target di tahun 2024 adalah dengan melakukan pemetaan atas komponen yang perlu dipertahankan.

**b. Indikator Kinerja Utama: Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI-WBBM**

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM merupakan IKU baru KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2023 .Adapun target dari IKU tersebut adalah sebesar 100. Realisasi atas IKU adalah sebesar 90 dengan capaian 90. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor : B/290/PW.04/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Keuangan, KPKNL Padangsidimpuan dikategorikan kantor yang tidak lolos seleksi administrasi pada Tingkat Penilaian Nasional.

| Kode IKU | Uraian IKU  | Realisasi<br>2022 | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Indeks<br>Max.<br>120% |
|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 9b-N     | Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI-WBBM | -                 | 100            | 90                | 90%                    |

Tabel 3. 21 Capaian Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBBM

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBBM Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan melibatkan seluruh Pejabat, ASN dan PPNPN.

Terhadap Rencana KPKNL Padangsidimpuan mengikuti Penilaian ZI WBBM Tahun 2025, maka segala dokumen yang dimintakan untuk dipenuhi dalam LKE agar dilengkapi dalam Pembangunan ZI WBBM yang dilakukan Tahun 2024 dan 2025. Terhadap segala dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi LKE maka akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi minimal 1 kali tiga bulan

## B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan dalam Peta Strategis KPKNL Padangsidimpuan yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama, salah satunya adalah sasaran strategis terkait pengelolaan keuangan yang optimal dengan indikator kinerja utama persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Adapun nilai jumlah anggaran KPKNL Padangsidimpuan TA 2023 adalah sebesar Rp3.240.148.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu) dengan persentase realisasi sebesar 93.17% atau sejumlah

Rp3.018.921.798,- (tiga milyar delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan). Berikut terlampir rincian realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2023:

| Kegiatan |   | Anggaran     | Realisasi    | Realisasi Anggaran (%) | Sisa Anggaran |
|----------|---|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| AEF.001  | Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara   | Rp1.959.000  | Rp1.740.000  | 88.82                  | Rp219.000     |
| AEF.002  | Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang   | Rp2.845.000  | Rp1.400.000  | 49.21                  | Rp.1.445.000  |
| AAH.001  | Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara  | Rp41.740.000 | Rp36.010.472 | 86.27                  | Rp.5.729.528  |
| AAH.002  | Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara   | Rp10.390.000 | Rp8.920.200  | 85.85                  | Rp1.469.800   |
| AAH.003  | Risalah Lelang  | Rp30.600.000 | Rp28.595.400 | 93.45                  | Rp.2.004.600  |
| AAH.301  | Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)   | Rp40.000.000 | Rp34.709.000 | 86.77                  | Rp5.291.000   |
| FAE.002  | Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset  | Rp14.756.000 | Rp12.071.000 | 81.80                  | Rp2.685.000   |
| FAE.003  | Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | Rp56.264.000 | Rp44.154.056 | 78.48                  | Rp12.109.944  |
| FAE.004  | Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara   | Rp9.300.000  | Rp5.590.000  | 60.11                  | Rp3.710.000   |
| FAE.005  | Rekomendasi Hasil Penilaian   | Rp10.580.000 | Rp9.025.000  | 85.30                  | Rp1.555.000   |
| FAE.007  | Penggalian Potensi Lelang   | Rp60.000.000 | Rp37.166.047 | 61.94                  | Rp22.833.953  |

|         |  |                 |                 |       |              |
|---------|--|-----------------|-----------------|-------|--------------|
| FAE.301 | Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU) | Rp14.956.000    | Rp8.548.000     | 57.15 | 6.408.000    |
| EBA.969 | Layanan Bantuan Hukum                                  | Rp14.518.000    | Rp12.516.932    | 86.22 | Rp2.001.068  |
| CAN.001 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                 | Rp29.900.000    | Rp29.681.400    | 99.27 | Rp218.600    |
| EBA.002 | Kerumahtanggaan  | Rp136.280.000   | Rp109.095.290   | 80.05 | Rp27.184.710 |
| EBA.994 | Layanan Perkantoran                                    | Rp1.282.409.000 | Rp1.199.262.449 | 93.52 | Rp83.146.551 |
| EBB.001 | Peralatan Fasilitas Perkantoran                        | Rp207.383.000   | Rp202.033.010   | 97.42 | Rp5.349.990  |
| EBB.004 | Gedung Bangunan  | Rp1.262.582.000 | Rp1.228.803.214 | 97.32 | Rp33.778.786 |
| BMB.002 | Kehumasan  | Rp4.266.000     | Rp2.473.000     | 57.97 | Rp1.793.000  |
| EBA.001 | Rekomendasi Kepatuhan Internal                         | Rp9.420.000     | Rp7.127.328     | 75.66 | Rp2.292.672  |

*Tabel 3. 22 Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran TA 2023*

## PENUTUP

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPKNL Padangsidempuan sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* tersebut untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan kinerja pada KPKNL Padangsidempuan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2023.

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padangsidempuan pada tahun 2023 secara umum hampir memenuhi seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan NKO mencapai 115,04%. Jumlah IKU pada tahun 2023 yaitu 20 IKU, terdapat 18 IKU yang mencapai status capaian HIJAU dan 2 IKU yang mencapai status capaian KUNING yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBBM.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan Masyarakat secara optimal.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padangsidempuan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPKNL Padangsidempuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.

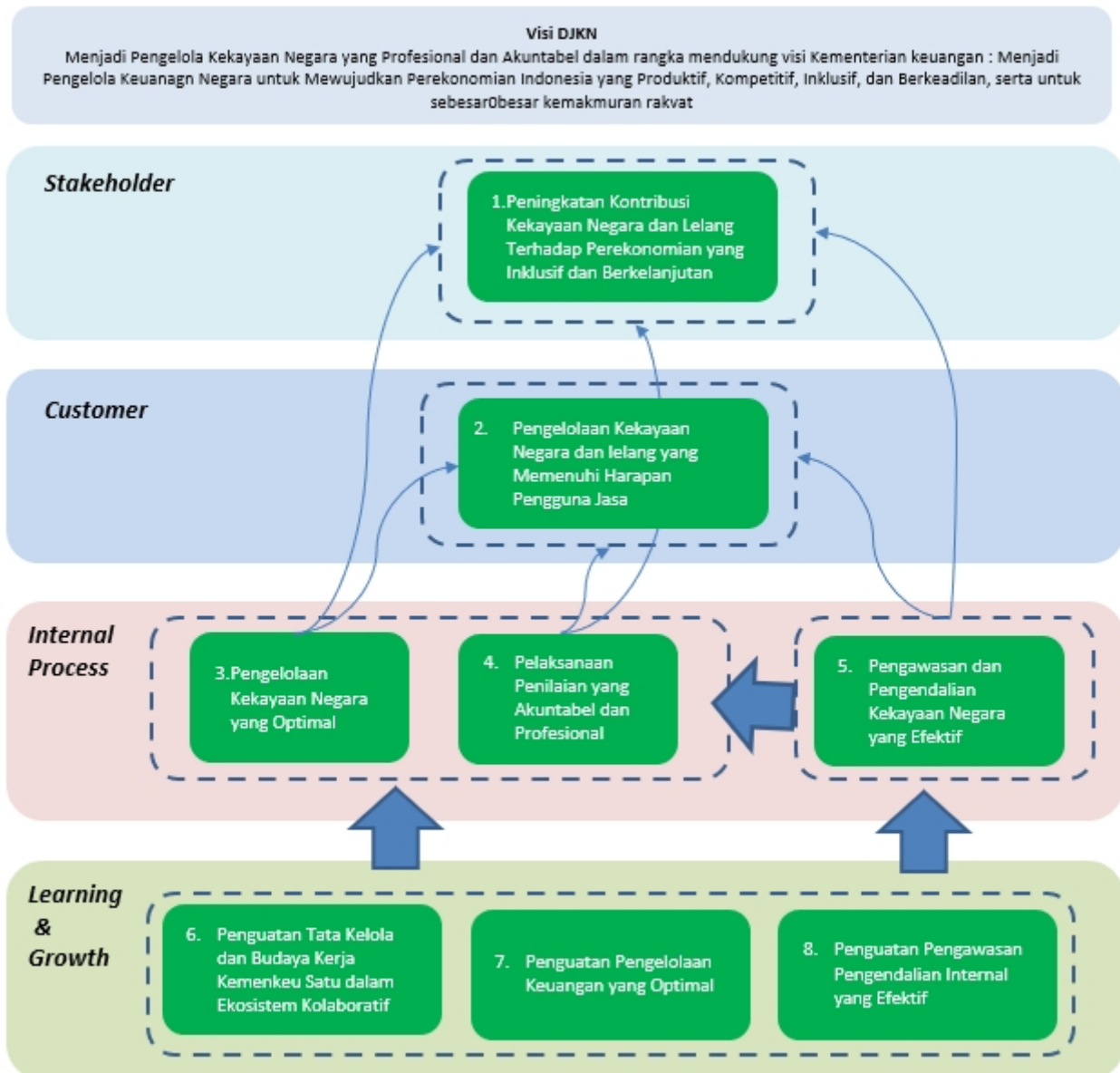
# LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-04/WKN.02/2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG PADANGSIDIMPUAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**PETA STRATEGI**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1   | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan | 1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%   |
|     |   | 1b-CP Persentase produktivitas lelang  | 80%    |
| 2   | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              | 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 100%   |
|     |   | 2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                    | 100%   |
|     |   | 2c-CP Persentase Permohonan Lelang Online  | 86%    |
|     |   | 2d-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction                 | 94%    |
| 3   | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal  | 3a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK                                      | 68     |
|     |   | 3b- CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan                                  | 100%   |
|     |   | 3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                         | 100%   |
| 4   | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  | 4a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian  | 25%    |
| 5   | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif  | 5a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara                  | 86     |
|     |   | 5b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN   | 15%    |
| 6   | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif                        | 6a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko                            | 80     |
|     |   | 6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai  | 100%   |
| 7   | Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal   | 7a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                       | 95,5   |
|     |   | 7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                                   | 100    |
| 8   | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif   | 8a-CP Indeks Integritas  | 88,67  |
|     |   | 8b-CP Indeks Maturitas SPIP  | 100    |
|     |   | 8c-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif                                     | 60     |
|     |   | 8d-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM                                 | 100    |



**Program/Kegiatan Tahun 2023****Anggaran**

| <b>Program/Kegiatan Tahun 2023</b>   |    | <b>Anggaran</b>      |
|--|----|----------------------|
| <b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>  | Rp | <b>285.912.000</b>   |
| 1. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara   | Rp | 1.959.000            |
| 2. Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang   | Rp | 2.845.000            |
| 3. Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara  | Rp | 41.740.000           |
| 4. Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara   |    |                      |
| 5. Risalah Lelang  | Rp | 10.390.000           |
| 6. Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)   |    |                      |
| 7. Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio aset  | Rp | 30.600.000           |
| 8. Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | Rp | 40.000.000           |
|  | Rp | 14.756.000           |
|  | Rp | 56.264.000           |
| 9. Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara   |    |                      |
| 10. Rekomendasi Hasil Penilaian  |    |                      |
| 11. Penggalan Potensi Lelang   | Rp | 9.300.000            |
| 12. Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)   | Rp | 10.580.000           |
|  | Rp | 60.000.000           |
|  | Rp | 7.478.000            |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  |    |                      |
| 1. Layanan Bantuan Hukum   |    |                      |
| 2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  | Rp | <b>2.946.758.000</b> |
| 3. Kerumahtangan   | Rp | 13.714.000           |
| 4. Operasionalisasi Kantor   | Rp | 29.900.000           |
| 5. Peralatan fasilitas perkantoran   | Rp | 104.944.000          |
| 6. Gedung/Bangunan   | Rp | 1.313.745.000        |
| 7. Kehumasan   | Rp | 47.291.000           |
| 8. Layanan Pengawasan Internal   | Rp | 1.422.674.000        |
|  | Rp | 5.070.000            |
|  | Rp | 9.420.000            |

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Padangsidimpuan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

| Kode SS/IKU | SS dan IKU  | Target |     |        |     |        |      |      |
|-------------|---|--------|-----|--------|-----|--------|------|------|
|             |   | Q1     | Q2  | Smt. 1 | Q3  | s.d.Q3 | Q4   | Y    |
| 1           | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan |        |     |        |     |        |      |      |
| 1a-CP       | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                      | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 1b-CP       | Persentase produktivitas lelang   | 30%    | 45% | 45%    | 60% | 60%    | 80%  | 80%  |
| 2           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              |        |     |        |     |        |      |      |
| 2a-CP       | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 20%    | 40% | 40%    | 70% | 70%    | 100% | 100% |
| 2b-CP       | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara   | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 2c-CP       | Persentase Permohonan Lelang Online   | 20%    | 40% | 40%    | 63% | 63%    | 86%  | 86%  |
| 2d-CP       | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction                                      | 94%    | 94% | 94%    | 94% | 94%    | 94%  | 94%  |
| 3           | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal  |        |     |        |     |        |      |      |
| 3a-CP       | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK   | -      | 50  | 50     | 55  | 55     | 68   | 68   |
| 3b-CP       | Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan  | -      | 40% | 40%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 3c-cP       | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)  | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%    | 100% | 100% |
| 4           | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  |        |     |        |     |        |      |      |
| 4a-CP       | Deviasi ketergunaan hasil penilaian   | 25%    | 25% | 25%    | 25% | 25%    | 25%  | 25%  |
| 5           | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif  |        |     |        |     |        |      |      |
| 5a-CP       | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara                                       | -      | 50  | 50     | -   | 50     | 86   | 86   |
| 5b-CP       | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN  | 15%    | 15% | 15%    | 15% | 15%    | 15%  | 15%  |



| Kode SS/IKU | SS dan IKU   | Target |      |        |      |        |       |       |
|-------------|--|--------|------|--------|------|--------|-------|-------|
|             |  | Q1     | Q2   | Smt. 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 6           | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif |        |      |        |      |        |       |       |
| 6a-N        | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko                         | -      | -    | -      | -    | -      | 80    | 80    |
| 6b-N        | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                       | 15%    | 40%  | 40%    | 75%  | 75%    | 100%  | 100%  |
| 7           | Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal                                      |        |      |        |      |        |       |       |
| 7a-CP       | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                     | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5  | 95,5  |
| 7b-N        | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan                                | 10%    | 50%  | 50%    | 85%  | 85%    | 100%  | 100%  |
| 8           | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif                          |        |      |        |      |        |       |       |
| 8a-CP       | Indeks Integritas  | -      | -    | -      | -    | -      | 88,67 | 88,67 |
| 8b-CP       | Indeks Maturitas SPIP  | -      | -    | -      | -    | -      | 100   | 100   |
| 8c-N        | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif                                  | -      | -    | -      | -    | -      | 60    | 60    |
| 8d-N        | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM                              | -      | -    | -      | -    | -      | 100   | 100   |

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Padangsidimpuan,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory |        | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|-----|---------------------|----------------|------------|--------|---------------------|------------------|------------|
|     |     |                     |                | Kegiatan   | Output |                     |                  |            |
| 1   | --  | --                  | --             | --         | --     | --                  | --               | --         |
|     |     |                     |                | --         | --     |                     |                  |            |

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Padangsidempuan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

| PEGAWAI YANG DINILAI  |  | PEJABAT PENILAI KINERJA  |  |                  |
|-----------------------|--|--|--|------------------|
| NAMA                  | Raden Hariyadi Murti Kurniawan, S.E.,<br>M.A.P.  | NAMA   | Tedy Syandriadi  |                  |
| NIP                   | 197510071996021001   | NIP  | 196508291991031001   |                  |
| PANGKAT/<br>GOL RUANG | Pembina, IV/a  | PANGKAT/<br>GOL RUANG  | Pembina Utama Madya, IV/d  |                  |
| JABATAN               | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan<br>Negara Dan Lelang Padangsidempuan  | JABATAN  | Kepala Kantor Wilayah Jenderal<br>Kekayaan Negara Sumatera Utara     |                  |
| UNIT KERJA            | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal<br>Kekayaan Negara Sumatera Utara   | UNIT KERJA   | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal<br>Kekayaan Negara Sumatera Utara |                  |
| NO                    | RENCANA HASIL KERJA  | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU   | TARGET   | PERSPEKTIF       |
| (1)                   | (2)  | (3)  | (4)  | (5)              |
| <b>A. UTAMA</b>       |  |  |  |                  |
| 1.                    | Persentase realisasi Penerimaan Negara<br>dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan<br>Lelang<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)                      | Persentase realisasi Penerimaan<br>Negara dari Pengelolaan Kekayaan<br>Negara dan Lelang | 100  | Penerima Layanan |
| 2.                    | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara<br>dan Lelang Terhadap Perekonomian yang<br>Inklusif dan Berkelanjutan<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Persentase produktivitas lelang  | 80   | Penerima Layanan |
| 3.                    | Pengelolaan Kekayaan Negara yang<br>Memenuhi Harapan Pengguna Jasa   | Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 100  | Penerima Layanan |



|    |   |  |     |                  |
|----|---|--|-----|------------------|
|    | (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)  |  |     |                  |
| 4. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                    | 100 | Penerima Layanan |
| 5. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Persentase Permohonan Lelang Online                                | 86  | Penerima Layanan |
| 6. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction | 94  | Penerima Layanan |
| 7. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)                                   | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK                      | 68  | Proses Bisnis    |
| 8. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)                        | Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan                   | 100 | Proses Bisnis    |
| 9. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)                        | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)         | 100 | Proses Bisnis    |



|     |   |  |      |                                     |
|-----|---|--|------|-------------------------------------|
| 10. | Deviasi ketergunaan hasil penilaian<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)  | Deviasi ketergunaan hasil penilaian                                  | 25   | Proses Bisnis                       |
| 11. | Pengawasan dan Pengendalian kekayaan<br>Negara yang Efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)                            | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan<br>Pengelolaan Barang Milik Negara | 86   | Proses Bisnis                       |
| 12. | Pengawasan dan Pengendalian kekayaan<br>Negara yang Efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)                            | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN                                   | 15   | Proses Bisnis                       |
| 13. | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja<br>Kemenkeu Satu dalam Ekosistem<br>Kolaboratif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Indeks Pengelolaan Kinerja dan<br>Kualitas Manajemen Risiko          | 80   | Penguatan Internal<br>atau Anggaran |
| 14. | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja<br>Kemenkeu Satu dalam Ekosistem<br>Kolaboratif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Persentase pengembangan<br>kompetensi pegawai                        | 100  | Penguatan Internal<br>atau Anggaran |
| 15. | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan<br>Anggaran<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah<br>Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)  | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan<br>Anggaran                      | 95,5 | Penguatan Internal<br>atau Anggaran |



|                    |   |  |       |                                  |
|--------------------|---|--|-------|----------------------------------|
| 16.                | Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)             | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan        | 100   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 17.                | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Indeks Integritas  | 88,67 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 18.                | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Indeks Maturitas SPIP                                    | 100   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 19.                | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif          | 60    | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 20.                | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara) | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM      | 100   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| <b>B. TAMBAHAN</b> |   |  |       |                                  |
| 1.                 | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif   | Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | 90    | Penguatan Internal               |



| PERILAKU KERJA |  |  |
|----------------|--|--|
| 1              | Berorientasi pelayanan   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br/>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2              | Akuntabel  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br/>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>  |
| 3              | Kompeten   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br/>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>  |
| 4              | Harmonis   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br/>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>            |
| 5              | Loyal  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,</li> </ul>                                  | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br/>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>  |



| PERILAKU KERJA |   |   |
|----------------|---|---|
|                | Instansi, dan Negara<br>- Menjaga rahasia jabatan dan negara  |   |
| 6              | Adaptif   |   |
|                | - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan<br>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas<br>- Bertindak proaktif  | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.                                  |
| 7              | Kolaboratif   |   |
|                | - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi<br>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah<br>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. |

Pegawai yang Dinilai,

1 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan  
197510071996021001

Ditandatangani secara elektronik  
Tedy Syandriadi  
196508291991031001



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

| DUKUNGAN SUMBER DAYA     |   |  |               |           |              |           |               |           |          |
|--------------------------|---|--|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 1.                       | 29 pegawai  |  |               |           |              |           |               |           |          |
| 2.                       | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. |  |               |           |              |           |               |           |          |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN |   |  |               |           |              |           |               |           |          |
| 1.                       | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan  |  |               |           |              |           |               |           |          |
|                          | <b>No</b>   | <b>IKI</b>   | <b>Target</b> |           |              |           |               |           |          |
|                          |   |  | <b>Q1</b>     | <b>Q2</b> | <b>Smt.1</b> | <b>Q3</b> | <b>s.d.Q3</b> | <b>Q4</b> | <b>Y</b> |
|                          | 1   | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 10            | 30        | 30           | 60        | 60            | 100       | 100      |
|                          | 2   | Persentase produktivitas lelang  | 30            | 45        | 45           | 60        | 60            | 80        | 80       |



| No | IKI  | Target |    |       |    |        |     |     |
|----|--|--------|----|-------|----|--------|-----|-----|
|    |  | Q1     | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4  | Y   |
| 3  | Persentase Realisasi Pokok Lelang                                  | 20     | 40 | 40    | 70 | 70     | 100 | 100 |
| 4  | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                    | 10     | 30 | 30    | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 5  | Persentase Permohonan Lelang Online                                | 20     | 40 | 40    | 63 | 63     | 86  | 86  |
| 6  | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction | 94     | 94 | 94    | 94 | 94     | 94  | 94  |
| 7  | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK                      |        | 50 | 50    | 55 | 55     | 68  | 68  |
| 8  | Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipkatkan                    |        | 40 | 40    | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 9  | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)         | 10     | 30 | 30    | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 10 | Deviasi ketergunaan hasil penilaian                                | 25     | 25 | 25    | 25 | 25     | 25  | 25  |
| 11 | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara  |        | 50 | 50    |    |        | 86  | 86  |
| 12 | Deviasi Data PNBPFungsional DJKN                                   | 15     | 15 | 15    | 15 | 15     | 15  | 15  |
| 13 | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko           |        |    |       |    |        | 80  | 80  |
| 14 | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                         | 15     | 40 | 40    | 75 | 75     | 100 | 100 |



| No                 | IKI   | Target |      |       |      |        |       |       |
|--------------------|---|--------|------|-------|------|--------|-------|-------|
|                    |   | Q1     | Q2   | Smt.1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 15                 | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran  | 95,5   | 95,5 | 95,5  | 95,5 | 95,5   | 95,5  | 95,5  |
| 16                 | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan   | 10     | 50   | 50    | 85   | 85     | 100   | 100   |
| 17                 | Indeks Integritas   |        |      |       |      |        | 88,67 | 88,67 |
| 18                 | Indeks Maturitas SPIP   |        |      |       |      |        | 100   | 100   |
| 19                 | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif   |        |      |       |      |        | 60    | 60    |
| 20                 | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM   |        |      |       |      |        | 100   | 100   |
| <b>KONSEKUENSI</b> |   |        |      |       |      |        |       |       |
| 1.                 | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.                     |        |      |       |      |        |       |       |
| 2.                 | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |        |      |       |      |        |       |       |

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan  
197510071996021001

Ditandatangani secara elektronik  
Tedy Syandriadi  
196508291991031001



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANWIL DJKN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2023**

| SS | IKU   | V/C | Uraian IKU   | Target Awal Tahun 2023  | Realisasi               |                         |                         | Target Q4 (Adendum)     | Realisasi                |
|----|-------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|    |       |     |  |                         | Q1                      | s.d Semester 1          | s.d. Q3                 |                         | s.d Q4 (Tahun 2023)      |
| 1  |       |     | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
|    | 1a-CP | P/M | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang   | MAX/TLK                 |                         |                         |                         |                         |                          |
|    | a.    |     | PNBP Pengelolaan BMN   | Rp3.775.000.000         | Rp 451.431.542          | Rp 2.062.344.861        | Rp 3.416.722.849        | Rp 3.775.000.000        | Rp 5.084.826.802         |
|    | b.    |     | PNBP Piutang Negara  | Rp2.500.000             | Rp 1.555.000            | Rp 16.120.455           | Rp 25.468.626           | Rp 2.500.000            | Rp 39.836.508            |
|    | c.    |     | PNBP Lelang  | Rp1.650.000.000         | Rp 304.728.291          | Rp 774.422.806          | Rp 1.441.911.451        | Rp 1.650.000.000        | Rp 2.237.682.901         |
|    |       |     | PL I   | Rp921.000.000           | Rp 130.483.575          | Rp 357.145.808          | Rp 723.838.411          | Rp 921.000.000          | Rp 1.061.026.523         |
|    |       |     | Pegadaian  | Rp729.000.000           | Rp 174.244.716          | Rp 417.276.998          | Rp 718.073.040          | Rp 729.000.000          | Rp 1.176.656.378         |
|    |       |     | Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang                              | Rp5.427.500.000         | Rp757.714.833           | Rp2.852.888.121         | Rp 4.884.102.925        | Rp 5.427.500.000        | Rp 7.362.346.211         |
|    |       |     | <b>Capaian IKU</b>   |                         | <b>13,96%</b>           | <b>52,564%</b>          | <b>89,988%</b>          |                         | <b>135,649%</b>          |
|    | 1b-CP | P/M | Persentase produktivitas lelang  | MAX/TLK                 |                         |                         |                         |                         |                          |
|    |       |     | <b>% Lot Lelang laku keseluruhan (40%)</b>   |                         | 105,00%                 | 105,00%                 | 105,00%                 |                         | 105,00%                  |
|    |       |     | Jumlah realisasi frekuensi lelang  |                         | 54                      | 177                     | 262                     |                         | 454                      |
|    |       |     | Target Frekuensi Lelang (Frekuensi lelang tahun sebelumnya)  | 398                     | 398                     | 398                     | 398                     | 398                     | 398                      |
|    |       |     | <b>% frekuensi lelang (60%)</b>  |                         | 13,57%                  | 44,47%                  | 65,83%                  |                         | 114,07%                  |
|    |       |     | <b>Capaian IKU</b>   | <b>80%</b>              | <b>50,14%</b>           | <b>68,68%</b>           | <b>81,50%</b>           | <b>80,00%</b>           | <b>110,44%</b>           |
| 2  |       |     | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
|    | 2a-CP | P/M | Persentase realisasi pokok lelang  | MAX/TLK                 |                         |                         |                         |                         |                          |
|    |       |     | Pokok Lelang Kelas I   | Rp23.550.000.000        | Rp3.562.898.733         | Rp 9.400.144.522        | Rp 18.355.672.930       | Rp 23.550.000.000       | Rp 28.415.821.903        |
|    |       |     | Pokok Lelang Pegadaian   | Rp36.450.000.000        | Rp8.712.235.800         | Rp 28.258.806.000       | Rp 58.338.410.200       | Rp 56.450.000.000       | Rp 104.196.744.000       |
|    |       |     | <b>Target/Realisasi Pokok Lelang</b>   | <b>Rp60.000.000.000</b> | <b>Rp12.275.134.533</b> | <b>Rp37.658.950.522</b> | <b>Rp76.694.083.130</b> | <b>Rp80.000.000.000</b> | <b>Rp132.612.565.903</b> |
|    |       |     | <b>Capaian IKU</b>   |                         | <b>20,46%</b>           | <b>62,76%</b>           | <b>127,82%</b>          |                         | <b>165,77%</b>           |

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANWIL DJKN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2023**

| SS                 | IKU  | V/C                                      | Uraian IKU   | Target Awal Tahun 2023 | Realisasi      |                  |                  | Target Q4 (Adendum) | Realisasi           |
|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                    |  |  |  |                        | Q1             | s.d Semester 1   | s.d. Q3          |                     | s.d Q4 (Tahun 2023) |
|                    | 2b-CP  | P/M                                      | Persentase Penurunan outstanding piutang Negara                    | MAX/TLK                |                |                  |                  |                     |                     |
|                    |  |  | Target/Realisasi   | Rp292.320.000          | Rp505.350.904  | Rp 1.577.763.090 | Rp 2.102.309.142 | Rp 2.100.000.000    | Rp 2.602.388.297    |
|                    | <b>CAPAIAN IKU</b>   |  |  |                        | -              | <b>172,88%</b>   | <b>539,74%</b>   | <b>719,18%</b>      | <b>123,92%</b>      |
|                    | 2c-CP  | P/M                                      | Persentase Permohonan lelang Online                                | MAX/TLK                |                |                  |                  |                     |                     |
|                    |  |  | Jumlah Permohonan Lelang Online                                    | 86%                    | 91             | 208              | 265              | 86,00%              | 436                 |
|                    |  |  | Total Permohonan Lelang yang Diterima                              |                        | 91             | 208              | 271              |                     | 436                 |
|                    | <b>CAPAIAN IKU</b>   |  |  |                        | -              | <b>100%</b>      | <b>100,00%</b>   | <b>97,79%</b>       | <b>100,00%</b>      |
|                    | 2d-CP  | P/M                                      | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction | MAX/TLK                |                |                  |                  |                     |                     |
|                    |  |  | Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction                               |                        | 54             | 177              | 262              |                     | 451                 |
|                    |  |  | Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction                  |                        | -              |                  |                  |                     | 3                   |
|                    |  | Capaian realisasi e-Auction              | 100,00%  |                        | 100,00%        | 100,00%          | 99,34%           |                     |                     |
|                    |  | Capaian Realisasi e-Conventional Auction |  |                        |                |                  | 0,66%            |                     |                     |
| <b>Capaian IKU</b> |  |  |  | <b>94%</b>             | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>   | <b>94,00%</b>    | <b>100,00%</b>      |                     |
| 3                  | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b> |  |  |                        |                |                  |                  |                     |                     |
|                    | 3a-CP  | P/L                                      | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                      | 68%                    | 85,65%         |                  |                  | 68%                 |                     |
|                    |  |  | a. Tingkat KesesuaianPengukuran                                    | Bobot 75%              | 80,85%         | 83,78%           | 75,66%           | Bobot 75%           | 79,27%              |
|                    |  |  | b. Monev Kesesuaian - Optimalisasi                                 | Bobot 25%              | 100,06%        | 93,42%           | 84,69%           | Bobot 25%           | 90,67%              |
|                    | <b>Capaian IKU</b>   |  |  |                        | <b>85,65%</b>  | <b>86,19%</b>    | <b>77,92%</b>    | <b>82,12%</b>       |                     |
|                    | 3b-CP  | P/L                                      | Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan                   | MAX/TLK                |                |                  |                  |                     |                     |
|                    |  |  | Target/Realisasi   | 353                    | 71             | 151              | 331              | 353                 | 642                 |
| <b>Capaian IKU</b> |  |  |  |                        | <b>20,11%</b>  | <b>42,78%</b>    | <b>93,77%</b>    | <b>181,87%</b>      |                     |

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANWIL DJKN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2023**

| SS                 | IKU  | V/C  | Uraian IKU  | Target Awal Tahun 2023 | Realisasi |                |         | Target Q4 (Adendum) | Realisasi           |
|--------------------|--|--|---|------------------------|-----------|----------------|---------|---------------------|---------------------|
|                    |  |  |   |                        | Q1        | s.d Semester 1 | s.d. Q3 |                     | s.d Q4 (Tahun 2023) |
| 4                  | 3c-CP  | P/M  | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN  | 34                     | 5         | 18             | 26      | 34                  | 41                  |
|                    | <b>Capaian IKU</b>   |  |   |                        | 14,71%    | 52,94%         | 76,47%  |                     | 120,59%             |
|                    | <b>Penerapan Tata Kelola kekayaan Negara dan lelang yang Efektif</b> |  |   |                        |           |                |         |                     |                     |
|                    | 4a-CP  | P/M  | Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)  | MAX/TLK                |           |                |         |                     |                     |
| 5                  |  |  | Evaluasi kinerja - 80%  | 51                     | 16        | 24             | 41      | 51                  | 70                  |
|                    |  |  | Penyusunan Rekomendasi - 20%  | 5                      | 3         | 3              | 6       | 5                   | 8                   |
|                    | <b>Capaian IKU</b>   |  |   |                        | 37,10%    | 49,65%         | 88,31%  |                     | 141,80%             |
|                    | <b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>          |  |   |                        |           |                |         |                     |                     |
|                    | 4a-CP  | P/M  | Deviasi ketergunaan hasil penilaian   | MIN/TLK                |           |                |         |                     |                     |
|                    |  | Rata-Rata Deviasi Pemanfaatan (40%)  | 25%   | 0,00%                  | 0,00%     | 0,00%          | 25,00%  | 0,00%               |                     |
|                    |  | Rata-Rata Deviasi Penjualan (60%)  |   | 0,00%                  | 0,00%     | 0,00%          |         | 0,00%               |                     |
| <b>Capaian IKU</b> |  |  |   | 0,00%                  | 0,00%     | 0,00%          |         | 0,00%               |                     |
| 6                  |  |  | Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif  |                        |           |                |         |                     |                     |
|                    | 5a-CP  | P/M  | Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara                                       | MAX/TLK                |           |                |         |                     |                     |
|                    |  |  | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L     |                        | 25        | 34             | 36      |                     | 36                  |
|                    |  |  | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L      |                        | 1         | 14             | 22      |                     | 29                  |
|                    |  |  | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 |                        | 37        | 37             | 37      |                     | 37                  |
|                    |  | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023 | 8   |                        | 29        | 29             | 29      |                     |                     |
| <b>Capaian IKU</b> |  |  | 86  | 57,78%                 | 72,73%    | 87,88%         | 86%     | 98,48%              |                     |

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANWIL DJKN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2023**

| SS                        | IKU                | V/C  | Uraian IKU                                   | Target Awal Tahun 2023 | Realisasi |                |              | Target Q4 (Adendum) | Realisasi           |
|---------------------------|--------------------|--|--|------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                           |                    |  |  |                        | Q1        | s.d Semester 1 | s.d. Q3      |                     | s.d Q4 (Tahun 2023) |
|                           | 5b-CP              | P/M  | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN            | MIN/TLK                |           |                |              |                     |                     |
|                           | a<br>b             |  | Deviasi Data PNBP Lelang                     | 15%                    | 0,17%     | 0,00%          | 0,00%        | 15%                 | 0,00%               |
|                           |                    |  | Deviasi Data PNBP Piutang Negara             | 15%                    | 0,00%     | 0,00%          | 0,00%        | 15%                 | 0,00%               |
|                           |                    |  | Rata-Rata Target                             | 15,0%                  |           |                |              | 15,0%               |                     |
|                           |                    |  | <b>Capaian IKU</b>                           |                        | 0,08%     | 0,00%          | 0,00%        |                     | 0,00%               |
| 7                         |                    | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif |  |                        |           |                |              |                     |                     |
| 6a-N                      | P/M                | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko                         | MAX/TLK                                      |                        |           |                |              |                     |                     |
|                           |                    | Nilai review pengelolaan kinerja (60%)   | 80   |                        |           |                | 80           | 99,08               |                     |
|                           |                    | Indeks Kualitas Manajemen Risiko (40%)   |  |                        |           |                |              | 97,5                |                     |
|                           |                    | <b>Capaian IKU</b>   | -  | -                      | -         | -              | <b>98,45</b> |                     |                     |
|                           | 6b-N               | P/M  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai   | MAX/TLK                |           |                |              |                     |                     |
|                           |                    |  | Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria        |                        | 27        | 28             | 27           |                     | 29                  |
|                           |                    |  | Jumlah bawahan total                         |                        | 28        | 28             | 27           |                     | 29                  |
|                           |                    |  | <b>% Capaian Utama</b>                       |                        | 96,43%    | 100,00%        | 100,00%      |                     | 100,00%             |
|                           |                    |  | Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria  |                        | 27        | 28             | 27           |                     | 29                  |
|                           |                    |  | Jumlah bawahan total                         |                        | 28        | 28             | 27           |                     | 29                  |
| <b>% Capaian Tambahan</b> |                    |  |  | 96,43%                 | 100,00%   | 100,00%        |              | 100,00%             |                     |
|                           | <b>Capaian IKU</b> |  | 115,71%                                      | 120,00%                | 120,00%   |                | 120,00%      |                     |                     |
| 8                         | -                  | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal                              |  |                        |           |                |              |                     |                     |
|                           | 7a-CP              | P/M  | Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | MAX/TLK                |           |                |              |                     |                     |
|                           |                    | Target/Realisasi   | 95,50%                                       | 95,46%                 | 93,32%    | 97,68%         | 100,00%      | 96,46%              |                     |
|                           |                    | <b>Capaian IKU</b>   |  | 99,96%                 | 97,72%    | 102,28%        |              | 96,46%              |                     |

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANWIL DJKN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2023**

| SS          | IKU              | V/C | Uraian IKU  | Target Awal Tahun 2023 | Realisasi |                |         | Target Q4 (Adendum) | Realisasi           |
|-------------|------------------|-----|---|------------------------|-----------|----------------|---------|---------------------|---------------------|
|             |                  |     |   |                        | Q1        | s.d Semester 1 | s.d. Q3 |                     | s.d Q4 (Tahun 2023) |
|             | 7b-CP            | P/M | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan       | MAX/TLK                |           |                |         |                     |                     |
|             | Target/Realisasi |     |   | 100%                   |           |                |         | 100%                | 120,00%             |
|             | Capaian IKU      |     |   |                        |           |                |         |                     | 120,00%             |
| 9           |                  |     | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif |                        |           |                |         |                     |                     |
|             | 1c-CP            | P/M | Indeks Integritas                                       | MAX/TLK                |           |                |         |                     |                     |
|             | Target/Realisasi |     |   | 88,67                  |           |                |         | 88,67               | 89,17               |
| Capaian IKU |                  |     |   |                        |           |                |         | 100,56%             |                     |
| 8c-N        | P/M              |     | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif         | MAX/TLK                |           |                |         |                     |                     |
|             | Target/Realisasi |     |   | 60                     |           |                |         | 60                  | 98,14               |
|             | Capaian IKU      |     |   |                        |           |                |         |                     | 163,57%             |
| 8d-N        | P/M              |     | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM     | MAX/TLK                |           |                |         |                     |                     |
|             | Target/Realisasi |     |   | 100                    |           |                |         | 100                 | 90                  |
|             | Capaian IKU      |     |   |                        |           |                |         |                     | 90,00%              |

Kepala KPKNL Padangsidimpuan



Ditandatangani secara elektronik  
**Raden Hariyadi Murti Kurniawan**

Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Ttd.

**Deddy Martinus Sinaga**



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**PERIODE TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2023**

| Kode                                  | IKU  | V/C | Target Q4 | Realisasi Q4 | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Keterangan   |
|---------------------------------------|--|-----|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
|                                       | Stakeholder Perspective(30%)   | 30% |           |              |            |                 |                    | 33,64%           |              |
| 1                                     | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan |     |           |              |            |                 |                    | 112,14%          |              |
| 1b-CP                                 | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang   | P/M | 100%      | 135,65%      | 14%        | 30%             | 135,65%            | 120,00%          | hijau        |
| 1b-CP                                 | Persentase produktivitas lelang  | P/M | 80%       | 105,00%      | 14%        | 30%             | 131,25%            | 120,00%          | hijau        |
| 1c-CP                                 | Indeks Integritas  | P/L | 88,67     | 89,17        | 19%        | 40%             | 100,56%            | 100,56%          | hijau        |
|                                       | Customer Perspective(20%)  | 20% |           |              |            |                 |                    | 24,00%           |              |
| 2                                     | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa   |     |           |              |            |                 |                    | 120,00%          |              |
| 2a-CP                                 | Persentase realisasi pokok lelang  | P/M | 100%      | 165,77%      | 14%        | 50%             | 165,77%            | 120,00%          | hijau        |
| 2b-CP                                 | Persentase Penurunan outstanding piutang Negara  | P/M | 100%      | 123,92%      | 14%        | 50%             | 123,92%            | 120,00%          | hijau        |
|                                       | Internal Process Perspective (25%)   | 25% |           |              |            |                 |                    | 29,30%           |              |
| 3                                     | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal  |     |           |              |            |                 |                    | 120,00%          |              |
| 3a-CP                                 | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK  | P/L | 68%       | 82,12%       | 19%        | 37%             | 120,76%            | 120,00%          | hijau        |
| 3b-CP                                 | Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan   | P/L | 100%      | 181,87%      | 19%        | 37%             | 181,87%            | 120,00%          | hijau        |
| 3c-CP                                 | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN   | P/M | 100%      | 120,59%      | 14%        | 27%             | 120,59%            | 120,00%          | hijau        |
| 4                                     | Penerapan Tata Kelola kekayaan Negara dan lelang yang Efektif  |     |           |              |            |                 |                    | 114,22%          |              |
| 4a-CP                                 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)  | P/M | 100%      | 141,80%      | 14%        | 33%             | 141,80%            | 120,00%          | hijau        |
| 2c-CP                                 | Persentase Permohonan lelang Online  | P/M | 86%       | 100,00%      | 14%        | 33%             | 116,28%            | 116,28%          | hijau        |
| 2d-CP                                 | Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction   | P/M | 94%       | 100,00%      | 14%        | 33%             | 106,38%            | 106,38%          | hijau        |
| 5                                     | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional   |     |           |              |            |                 |                    | 120,00%          |              |
| 4a-CP                                 | Deviasi ketergunaan hasil penilaian  | P/M | 25%       | 0,00%        | 14%        | 100%            | 200,00%            | 120,00%          | hijau        |
| 6                                     | Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif   |     |           |              |            |                 |                    | 114,52%          |              |
| 5a-CP                                 | Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara  | P/M | 86%       | 98,48%       | 14%        | 100%            | 114,52%            | 114,52%          | hijau        |
|                                       | Learning & Growth Perspective (25%)  | 25% |           |              |            |                 |                    | 28,10%           |              |
| 7                                     | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif                                   |     |           |              |            |                 |                    | 120,00%          |              |
| 6a-N                                  | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko   | P/M | 80        | 98,45        | 14%        | 50%             | 123,06%            | 120,00%          | hijau        |
| 6b-N                                  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai   | P/M | 100%      | 120,00%      | 14%        | 50%             | 120,00%            | 120,00%          | hijau        |
| 8                                     | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal  |     |           |              |            |                 |                    | 112,15%          |              |
| 7a-CP                                 | Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran   | P/M | 100,0%    | 96,46%       | 14%        | 33%             | 96,46%             | 96,46%           | kuning       |
| 7b-CP                                 | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan  | P/M | 100%      | 120,00%      | 14%        | 33%             | 120,00%            | 120,00%          | hijau        |
| 5b-CP                                 | Deviasi Data PNBPFungsional DJKN   | P/M | 15%       | 0,00%        | 14%        | 33%             | 200,00%            | 120,00%          | hijau        |
| 9                                     | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif  |     |           |              |            |                 |                    | 105,00%          |              |
| 8c-N                                  | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif  | P/M | 60        | 98,14        | 14%        | 50%             | 163,57%            | 120,00%          | hijau        |
| 8d-N                                  | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM  | P/M | 100       | 90           | 14%        | 50%             | 90,00%             | 90,00%           | kuning       |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b> |  |     |           |              |            |                 |                    | <b>115,04%</b>   | <b>hijau</b> |

Kepala KPKNL Padangsidimpuan

Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Ttd

Ditandatangani secara elektronik  
**Raden Hariyadi Murti Kurniawan**

**Deddy Martinus Sinaga**